

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan provinsi yang letaknya di Pulau Jawa, yang merupakan daerah khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia. DKI Jakarta terbagi menjadi lima wilayah secara Kota Administrasi yang langsung dipimpin oleh Wali kota dan Kabupaten Administrasi dipimpin langsung oleh Bupati, diantara lima Wilayah itu ialah :

Kota administrasi :

1. Jakarta Pusat dengan luas wilayah 47,90 km².
2. Jakarta Utara dengan luas wilayah 142,20 km².
3. Jakarta Barat dengan luas wilayah 126,15 km².
4. Jakarta Selatan dengan luas wilayah 145,73 km².
5. Jakarta Timur dengan luas wilayah 187,73 km².

Kabupaten administrasi :

Kepulauan Seribu dengan luas wilayah 11,81 km², dengan sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi muara 13 sungai dan 2 kanal.¹

Dengan menjadi ibu kota negara bukan berarti Jakarta tidak mempunyai permasalahan di dalamnya. Terutama di dalam permasalahan lingkungan. Banjir yang sudah menjadi permasalahan bahkan sejak lama namun sampai hari ini masih belum terselesaikan. Permasalahan lingkungan selain banjir adalah tentang bagaimana pengelolaan sampah yang masih di anggap kurang.

Lingkungan merupakan digdaya integrasi bangsa dan manusia dari berbagai perbedaan yang ada diantara keutuhan keduanya secara menyeluruh yang lebih tertata. Hampir secara aklamasi dalam pengakuan bahwa kepentingan utama komunitas politik - negara, masyarakat sipil, dan komunitas ekonomi setuju

¹ Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemprov DKI Jakarta, “*Tentang Jakarta*” (<https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta>, diakses pada 10 Agustus 2022)

bahwa lingkungan ini adalah tempat krisis konstitusional global hampir setiap negara menghubungkan dan menempatkan lingkungan sebagai mata rantai dalam kepentingan komunitas politik, pada landasan ideologi humanisme antara warga negara, komunitas dan pribadinya masing-masing dari sembarang etnis, ideologi, kebudayaan dan strata finansial di dalamnya.

Dengan posisi seperti ini namun sering terjadi isu lingkungan yang kian merambat dan tak kunjung usai, di mana pada isu lingkungan ini melekat pada kepentingan politik, terutama pada permasalahan kebersihan tempat lingkungan berupa sampah yang masih belum bisa diakomodasi dan selalu tidak ada tindakan yang subjektif dalam penyelesaiannya. Sehingga mampu menghasilkan bentuk hubungan dengan model yang tidak sederhana serta interaksi politik paling kompleks dalam keterlibatan aktor (elit politik) paling majemuk dalam untuk penyelesaiannya².

Lingkungan memiliki beberapa karakteristik unik yang ideal dan dapat dijadikan sebagai acuan politik menjadi alat dalam mengelola kepentingan kolektif, dengan 3 karakteristik lingkungan, yaitu:

1. Lingkungan sebagai satu kesatuan
2. Lingkungan tidak pernah setia dan tidak pernah dapat dipisahkan dari ruang yang diciptakan oleh politik
3. Distrik-distrik tidak setia dan tidak pernah dapat diperintah oleh perkebunan yang dibuat secara administratif

Lingkungan juga merupakan kekuatan penting dalam pembentukan kekuatan politik. Dalam kata pengantar dapat ditegaskan bahwa lingkungan telah jauh dari posisi semula sebagai masalah politik global menjadi ideologi yang dapat dirumuskan sebagai humanisme global. Dalam konteks ini dibahas pemahaman tentang posisi strategis lingkungan dalam politik Indonesia³. Biasanya disebut sebagai lingkungan dan politik: harmoni dan kontradiksi, cita-cita ini bisa menjadi acuan bagi politik sebagai instrumen ketertiban.

² Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 11, No 2 (2007), hal. 154.

³ Ibid., 156

Kemudian, permasalahan Lingkungan semakin hari semakin mengalami peningkatan pada masyarakat. Paling krusial adalah permasalahan sampah yang ada pada lingkungan kehidupan masyarakat, pemerintah dalam pengelolaan sampah pada suatu daerah harus memiliki strategi dan penguatan hukum yang dapat mengatur sampah dan lahan pembuangan pada lingkungannya, dengan memberikan perubahan pada kebijakan penguat pengelolaan sampah pada lingkungan dan setingkat RW (Rukun Warga), ini menjadi paradigma transformasi perubahan penguatan orientasi pengelolaan lingkungan serta masyarakatnya, kemudian tidak hanya pemerintah atau pemangku kepentingan saja dalam melakukan pengelolaan sampah dengan baik, melainkan masyarakat yang tinggal pada lingkungan dan menjadi laboratorium utama dalam beraktivitas memiliki peran penting dalam kehidupan yang bersih, dalam kehidupan yang berperan untuk kesejahteraan aktivitas yang lebih efektif.

Kata efisiensi atau efektif masyarakat dalam bekerja dan hidup dalam konteks pengelolaan sampah dapat dicapai melalui tiga (tiga) pilar, yaitu:

1. Pemerintah
2. Masyarakat Luas
3. Dunia usaha berjalan secara solid (terintegrasi), menyeluruh (*komprensif*), dan saling menguntungkan (*mutually benefit*).

Dengan penerapan tiga pilar ini sebenarnya mengusung konsep gotong royong, secara implisit dapat menghadirkan pengelolaan sampah dengan baik pada modal sosial yang strategis dan berkelanjutan bagi kesehatan aktivitas kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi politik dalam mendorong suatu kebijakan yang memperkuat pada bidang konstitusi ini nantinya mampu menjadi penunjang atau pendorong utama dalam. Sudut pandang penempatan posisi, peran dan hubungan yang kuat negara/pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi, pemerintahan yang baik, penegakan hukum terhadap pengelolaan kehidupan dan pengelolaan sampah pada khususnya.⁴

⁴ Aidil Aulya Fasdani, Jurnal Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan

Penguatan UU Pengelolaan Sampah menjadi tanggung jawab utama pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk lebih proaktif dan tanggap terhadap isu lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah, kemudian dengan kebijakan strategis dan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat dalam proses desain empiris. Kebijakan informasi sektor dan persentase permintaan dan kebutuhan kepada masyarakat, dimulai dengan penggunaan layanan yang didelegasikan langsung oleh penyedia layanan kebersihan pada RT, RW, pemerintah dan perusahaan swasta yang ada mewakili pihak atau kelompok kepentingan dalam usaha dan kepentingan semua.

Proses pengajuan kebutuhan bisa dilakukan atau diterapkan sebagai peran masyarakat pada bagian partisipasi atau keterlibatan langsung dalam pembuatan kebijakan, hal ini bisa dihadirkan untuk mengoptimalkan kembali strategi dan kebutuhan yang belum terakomodasi atas dasar keresahan masyarakat, seperti melakukan bentuk audiensi masyarakat kepada pemerintahan setingkat RT, RW kemudian pengajuan masuk kepada Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga setingkat provinsi untuk membawa proses politik dalam kehadiran suatu kebijakan, permainan input dan output saling berkaitan sebagai dasar rantai yang tak terputus⁵. Sampah yang dimaksud adalah hasil kegiatan manusia sehari-hari dan sisa sampah alam berbentuk padat. Dengan pengelolaan sampah yang sistematis, penanganan sampah tentu bisa dikurangi, berkesinambungan, dengan sistem yang memberikan batasan timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah kembali pada pengelolaannya.

Di Provinsi DKI Jakarta, kota administratif Jakarta Selatan, terjadi konflik besar atas pengelolaan lingkungan dan penguatan kapasitas lahan di Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS) di Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dihuni oleh 28.443 jiwa dan 14.499 laki-laki. dan perempuan 13.944 jiwa dengan luas 276,80 ha, dan wilayah kecamatan terbagi menjadi 10 Rukun Warga (RW), 110 Rukun Tetangga (RT), tersebar dan terdaftar secara administratif sebagai kecamatan, dengan hanya satu TPA sementara muncul pada

⁵ Ibid

tahun 2015 permasalahan lingkungan akibat pengaruh politik, produktivitas sampah yang ditimbun di TPA Pasar Minggu sekitar 134 ton per hari.

Masalah ini bukan diakibatkan karena lahan yang tidak mampu menampung sampah, melainkan akses jalur yang di tutup untuk sampai pada Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Bekasi Barat, jalur yang biasa menggunakan dua jalur namun pada saat itu hanya bisa menggunakan satu jalur dan dibatasi pembawaan sampah yang ada dari DKI Jakarta terutama pada Kelurahan Pasar Minggu, melalui jalur Cileungsi menuju Bekasi barat tidak di perbolehkan untuk berkendara dengan truk penuh sampah.

Mengabaikan pengangkutan sampah, di mana sebelum jalur truk sampah ditutup, sekitar 13 atau 14 liter dapat terkumpul dalam sehari, kini sampah baru dapat diangkat dalam dua hari, sedangkan TPS memiliki 10 unit di Pasar Minggu. Truk sampah swasta dan truk sampah 4 unit dari dinas kebersihan DKI Jakarta, sehingga menimbulkan penumpukan pada TPS Pasar Minggu, dalam kasus ini yang terjadi peranan masyarakat dalam membawa aspirasi penguatan proses politik pada kebijakan dimulai, dengan ada pembuatan keresahan yang diajukan melalui RT dan berlanjut Kepada RW kemudian masuk kepada Kelurahan dengan membuat bentuk dukungan untuk perkuat UU atas izin melintas jalur bagi truk sampah menuju pembuangan akhir, dan menuntut serta mengawal untuk di bukanya kembali jalur yang bisa di akses melalui jalur Cileungsi, supaya lebih efisiensi waktu dan banyak nya volume sampah yang bisa diangkat.

Bentuk partisipasi politik masyarakat ditegaskan dengan segera ditetapkannya Peraturan Gubernur Pengelolaan Sampah Wilayah RW, dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah RW, ditunjuk oleh Direktur RW dan dinominasikan oleh RW. kursi oleh RW. bertanggung jawab kepada pengelola RW. Agar nantinya dimaksimalkan sesuai dengan kehidupan dan kenyamanan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, maka strategi yang paling utama dan terencana adalah pada operasi pembersihan sarana dan taman MCK serta pelayanan Kelurahan, namun usulan perbaikan sarana dan

prasarana belum memaksimalkan daya dukung sampah yang di tumpuk di TPS. Partisipasi dapat diidentifikasi melalui 3 perspektif, yaitu:

1. Perspektif di mana partisipasi merupakan kegiatan berbagi hasil pembangunan secara massal;
2. Perspektif masyarakat telah menyumbangkan pendapatannya secara masif untuk pembangunan;
3. Dan partisipasi ini harus berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan pembangunan dengan harapan agar pengelolaan sampah selalu melibatkan banyak orang berpartisipasi dalam pengabdian kepada masyarakat agar lingkungan di daerah tersebut selalu terjaga dan menjadi lingkungan yang asri.⁶

Namun berdasarkan realita fakta lapangan yang terus diamati, pembuangan sampah di Desa Pasar Minggu berlangsung dalam dua tahap yakni sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tangan membuat vas dari kardus bekas dan botol bekas yang dapat digunakan sebagai botol bekas, sedangkan langkah kedua adalah pembuangan limbah. apa yang diambil bisa dibakar.

Masalah terbesar dalam pengelolaan kebersihan di kota Jakarta selama ini adalah sistem pemilahan sampah TPS/TPPS yang masih tradisional. kemudian, dari sisi bank sampah, seharusnya sampah dipisahkan oleh TPS, sehingga program ini dinilai kurang efektif. Pemisahan sampah terkonsentrasi hanya di beberapa tempat, tidak seragam di semua tempat, bahkan ada pemukiman kota yang tidak memiliki TPS, sehingga sampah yang tercipta di tumpuk di depan rumah tanpa di pilah kemudian diangkut ke TPA. TPA selama tahap kedua adalah pembuangan limbah. apa yang diambil bisa dibakar.

Dengan permasalahan yang sudah di uraikan di atas terkait sampah yang kian hari-kian menumpuk tanpa diselesaikan dan di proses secara seharusnya, hal ini juga mendorong ketidaknyamanan dari masyarakat sehingga melakukan protes yang di sampaikan kepada ketua RT nya. Pasar Minggu adalah bukti nyata pada

⁶ San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat* (Yogyakarta : Center for Critical Social Studies Yogyakarta : Center for Critical Social Studies, 2003), hal. 56.

ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup yang baik, bersih, dan nyaman untuk penghuni yang menempati di sekitarnya.

Bermula di tahun 2015 terjadi kebakaran pada TPS Pasar Minggu yang diduga karena adanya penumpukan sampah yang ketinggiannya sampai 10 meter lebih karena didiamkan sampai satu minggu, sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang memanas sehingga timbulnya api dan menyebabkan kebakaran yang hebat. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2019 kejadian yang hampir sama terjadi kembali dikarenakan permasalahan sampah pada TPS yang menumpuk, namun kali ini terjadi pada rumah salah satu warga Kelurahan Pasar Minggu. Ketika banyaknya laporan warga Pasar Minggu terkait penumpukan sampah di TPS Pasar Minggu yang membuat warga tidak dapat membuang sampahnya di TPS setempat, sehingga menyebabkan penimbunan sampah di rumah warga. Salah satunya warga RW 5 yang nekat membakar sampahnya sendiri di pekarangan rumahnya, nahasnya bukan hanya sampahnya saja yang menghilang namun rumahnya juga ikut menghilang lantaran dilahap si jago merah.

Dorongan dari ketidaknyamanan ini sampai pada RT yang lalu di lanjutkan kepada RW lalu ke lurah dan sampai ke tingkat provinsi sebagai prosedural untuk menyampaikan aspirasi dari warganya. Partisipasi politik yang berkesinambungan dan dibangun melalui tingkatan bawah sampai ke tingkatan atas ini berhasil menekan terciptanya peraturan yang mengatur tentang sampah yang terkhusus atau berfokus di dalam ruang lingkup RW.

1.2 Rumusan Masalah

Sebuah peranan dan keterlibatan stakeholder dalam memproses suatu kebijakan politik dengan keikutsertaan berupa partisipasi politik masyarakat untuk melihat kebutuhan yang ada baik secara penyadaran politik dan lingkungan sebagai tempat untuk kehidupan, maka berdasarkan yang telah di paparkan melalui latar belakang pendahuluan oleh penulis, dari sebuah rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana bentuk proses partisipasi politik masyarakat dalam mengawal proses pembuatan kebijakan dan penguat pada penguat hukum terkait dengan lingkungan dalam mengatasi permasalahan politik lingkungan yang terjadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik

Menganalisis dan Membahas sebuah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam keterlibatan proses pembuatan kebijakan yang berfokus pada lingkungan, yang dapat memengaruhi kehidupan bermasyarakat serta aspek pada kehidupan ekonomi, budaya dan politik masyarakat untuk berinteraksi antara satu sama lain, kemudian, faktor faktor dalam proses pencetus kebijakan baru yang sesuai atas kebutuhan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Praktisi

Mendapatkan sebuah hasil penelitian secara langsung dari peran masyarakat, proses politik kebijakan dalam penanganan kasus permasalahan lingkungan yang terjadi, serta orientasi kehidupan masyarakat dalam orientasi keberhasilan pengawalan pembuatan kebijakan yang berfokus pada lingkungan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Membantu dalam memberikan masukan baru secara pengetahuan dalam pengembangan studi ilmu politik melalui peranan organisasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional

1.4.2 Manfaat Praktisi

Sebuah Hasil penelitian yang diharapkan sebagai acuan bagi pemerintah, masyarakat serta pihak terkait lainnya dalam penerapan pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bentuk kontrol sosial atas keperluan berkehidupan serta kepekaan dalam

bentuk partisipasi politik dan peranan pengawalan proses pembuatan kebijakan yang bisa dilakukan dimulai dari masyarakat dalam perilaku politik yang digunakan untuk mendapatkan hasil tujuan bersama.

1.4.3 Manfaat Teoretis

Menjadi sumber data dan informasi yang relevan dalam penelitian sebuah peran masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan atau peraturan, dan hasil penelitian yang diharapkan mampu sebagai rujukan dan bagian literatur politik.

1.4 Sistematika Penulisan

Dengan mendeskripsikan dan memaparkan penelitian yang penulis sedang teliti guna mengetahui sebuah partisipasi politik dalam kepekaan masyarakat dan proses pengetahuan untuk alur pembuatan kebijakan pada proses politik dari satu kasus yang berlangsung, untuk itu penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Di bab pertama: Memperlakukan pendahuluan sebagai bab pembuka atau opening yang tersusun dari beberapa wacana sebagai komponennya, yaitu: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Di bab kedua ini: Kajian pustaka disusun menjadi bagian atau sub bab tentang konsep dan teori yang digunakan, kajian pustaka, dan kerangka atau konsep pemikiran yang akan menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam menulis atau mengkaji penelitian ini, khususnya merujuk pada

pendekatan penelitian, pendekatan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan rencana penelitian.

BAB IV

PARTISIPASI POLITIK KELURAHAN PASAR MINGGU DALAM PEMBUATAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH LINGKUP RUKUP WARGA

Pada Bab IV ini membahas tentang isi dan hasil penelitian lapangan yang diambil secara langsung oleh penulis dalam membagi beberapa sub bab, dengan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data primer dan sekunder yang terkumpul; antara lain : Gambaran Umum Lokasi Penelitian pada Kelurahan Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, kasus lingkungan tahun 2015, Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Gubernur no. 77 tahun 2020, serta penyelesaian konflik yang dilihat dari disiplin ilmu sosial dan politik pada keterlibatan partisipasi politik, lingkungan dan kebijakan yang tumpang tindih.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir atau Bab V merupakan penutup dari uraian penelitian ini yang merupakan hasil penelitian umum penulis.